

FAKTOR PENENTU KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Determining Factors Of Inequality Between Regions In Province Kepulauan Riau

¹Nur'aini Shabrina,² Aan Julia, dan ³Ade Yunita Mafruhah.

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

irinashabrina10@gmail.com

Abstract— The formation of the Riau Islands Province as an autonomous region has made the Riau Islands a province that has positive growth. The formation of regional autonomy aims to spur equitable development and its results where success in the course of economic development can be seen from high economic growth accompanied by equity. However, high growth in the Riau Islands Province is not accompanied by equitable development between regions. This study was designed to determine the factors that influence the development inequality between regions that occurs in the Riau Islands. This research uses quantitative methods. The data used is panel data (pooled data), which is a combination of time series and cross section data with the help of Eview 10. The data uses data from 7 districts and cities in the Riau Islands Province from 2012 to 2019. The results showed simultaneously that the Human Development Index, Investment and Agglomeration had a significant effect on inequality between regions in the Riau Islands Province. while partially that the Human Development Index and Agglomeration variables have a positive and significant effect on inequality, while investment has a negative and significant effect on inequality.

Keywords— *Inequality, Development and Pooled Data*

Abstrak— Terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah otonom menjadikan Kepulauan Riau sebagai provinsi yang tumbuh positif. Pembentukan otonomi daerah bertujuan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dimana keberhasilan dalam perjalanan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pemerataan. Namun pertumbuhan yang tinggi di Provinsi Kepulauan Riau tidak dibarengi dengan pemerataan pembangunan antarwilayah. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi di Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data panel (pooled data) yang merupakan kombinasi data time series dan cross section dengan bantuan Eview 10. Data tersebut menggunakan data dari 7 kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2012 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, Investasi dan Aglomerasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan secara parsial variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, sedangkan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan.

Kata Kunci— *Ketidaksetaraan, Pengembangan dan*

Kumpulan Data

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia negara yang menerapkan prinsip desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Sejak reformasi hingga saat ini munculnya otonomi daerah dan berbagai undang-undang otonomi diakhir tahun 1990-an hingga mengakibatkan adanya pemekaran wilayah. Berbagai tuntutan pemekaran wilayah di Indonesia meliputi tingkat provinsi, kabupaten/kota. pada UU No. 34 tahun 2004 pasal 1 ayat 7 bahwa pengertian otonomi, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam mengurus pemerintahan daerahnya dan mengelola pembangunan daerahnya masing-masing (Elvawati, 2013; Sjafrizal, 2012).

Alasan terbentuknya daerah otonomi baru seperti; Pemerintah lebih mengedepankan sentralisasi atau pusat; dan adanya faktor ketidakadilan dimana daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tapi tidak bisa menikmati hasil karena adanya monopoli oleh pusat. Pembentukan daerah otonomi berdasarkan oleh tujuan menurut undang-undang No 32 tahun 2004, otonomi daerah mengarah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, peningkatan kesejahteraan rakyat. (Elvawati, 2013).

Diantara tahun 2000-2006 terdapat empat Provinsi yang memekarkan diri yaitu Provinsi Banten, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja Provinsi Kepulauan Riau pasca pemekaran menunjukkan indikator pertumbuhan angka yang positif. memiliki kemampuan PDRB per kapita paling tinggi yaitu sebesar 34,54 juta per kapita dan menunjukkan indikator kinerja ekonomi terbaik yaitu sebesar 8,64 dari ketiga provinsi lainnya.

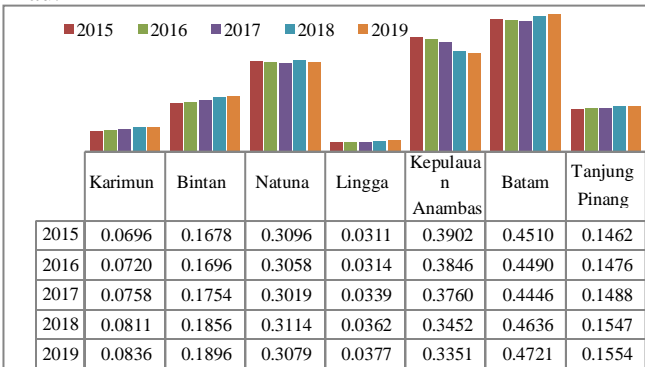
Pertumbuhan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan daerah induknya yaitu Provinsi Riau secara rata-rata lebih cepat yaitu sebesar 128,63 persen dan 95,05 persen. Besarnya rata-rata pertumbuhan standar hidup yang diterima penduduk Kepulauan Riau yaitu 3,78 persen lebih baik dibanding daerah riau -5,86 persen. Keberhasilan dalam perjalanan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan. Terjadinya proses pertumbuhan yang cenderung tinggi akan menyebabkan semakin

bertambahnya ketimpangan antar golongan masyarakat (kaya dan miskin) serta ketimpangan antar daerah (maju dan terbelakang) (Adisasmita, 2005).

TABEL 1. KONTRIBUSI PDRB TIAP KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015-2019 (%)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Karimun	4,84	4,98	5,14	5,16	5,15
Bintan	7,78	7,78	7,95	8,01	8,10
Natuna	9,00	8,70	8,67	8,64	8,29
Lingga	1,53	1,54	1,62	1,62	1,62
Kepulauan Anambas	8,08	7,78	7,63	6,89	6,63
Batam	60,80	61,22	60,99	61,87	62,55
Tanjung Pinang	7,98	8,00	8,00	7,80	7,67
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kepulauan Riau dalam angka 2020, diolah. Dilihat melalui kontribusi PDRB setiap daerah di Kepulauan Riau bahwa memperlihatkan adanya ketimpangan dimana Kota Batam memberikan sumbangan terhadap ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2015-2019 rata-rata sebesar 61,48%. Sementara itu Kepulauan Anambas dan masing-masing kabupaten yang lain hanya memberikan sumbangan kurang dari 10% tiap tahunnya terhadap ekonomi wilayah Provinsi Kepulauan Riau.



Sumber: BPS Kepulauan Riau (diolah).

Gambar 1. Indeks Williamson Tiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015- 2019

Berdasarkan angka Indeks Williamson, Kota Batam merupakan daerah dengan ketimpangan tertinggi dengan rata-rata sebesar 0,4560 dan diikuti dengan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan dengan rata-rata sebesar 0,3662 selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Sedangkan Indeks Williamson terendah dimiliki oleh Kabupaten

Lingga dengan rata rata indeks sebesar 0,0341 dalam 5 tahun terakhir. Dapat disimpulkan bahwa Kota Batam sebagai wilayah yang pertumbuhannya sangat pesat memiliki tingkat ketimpangan paling tinggi juga, namun Kepulauan Anambas sebagai daerah dengan kontribusi ekonomi yang rendah terhadap provinsi tapi memiliki tingkat ketimpangan daerah yang tinggi pula.

Menurut Sjafrizal (2012) salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan salah satunya faktor demografi. Indeks Pembangunan Manusia ini dapat mengukur pencapaian pembangunan dalam sisi sosioekonomi suatu wilayah, dilihat dari bidang kesehatan, pendidikan serta tingkat kesejahteraan. Kota Batam merupakan daerah yang memiliki Indeks Pembanguana Manusia (IPM) tertinggi pada tahun 2019 namun memiliki nilai Indeks Williamson atau ketimpangan yang tinggi pula sedangkan IPM yang tinggi seharusnya dapat menurunkan tingkat ketimpangan disuatu daerah, sedangkan di Kabupaten Lingga merupakan daerah dengan IPM terendah dengan kondisi ketimpangan yang rendah pula. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah menetapkan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) di Provinsi Kepri pada tahun 2007 sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ). kondisi geografis ketiga daerah yang terletak strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan internasional sehingga pemerintah mengambil peluang dengan menjadi tiga daerah tersebut sebagai pintu bagi arus masuk investasi barang dan jasa ke luar negeri, dan berfungsi juga sebagai sentral pengembangan industri. (Kompasiana, 2012).

Keuntungan lokasi (*location advantage*) yang dimiliki oleh daerah Kepulauan Riau menjadi kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi. Investasi merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, namun Investasi juga dapat mempengaruhi ketimpangan sesuai dengan teori Myrdal yang mengatakan bahwa ketimpangan memiliki keterkaitan dengan sistem kapitalis dimana adanya motif laba, namun investasi dapat mempengaruhi ketimpangan karena tidak semua wilayah menjadi tujuan investasi, dikarenakan perkembangan pembangunan yang terpusat ada di wilayah yang memiliki harapan laba tinggi dan wilayah lainnya terbelakang. Investasi yang direalisasikan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sampai dengan 2019 berpusat di Kota Batam selanjutnya diikuti daerah Bintan dan Karimun. Kondisi yang sama terjadi pada realisasi investasi dalam bentuk Penanaman modal asing memperlihatkan Kota Batam menjadi daerah dengan angka yang paling tinggi di banding daerah lainnya kondisi tersebut mengindikasikan terpusatnya pembangunan di Kota Batam dengan motif laba yang besar sehingga akan menciptakan kelangkaan modal di wilayah lainnya yang akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang.

Menurut Syafrizal (2008) selain investasi, aglomerasi juga dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar daerah. Aglomerasi yang

diproksi dari PDRB daerah dibagi dengan PDRB total seluruh daerah menunjukkan hasil aglomerasi produksi. Angkanya menunjukan terjadinya ketidakmerataan kegiatan ekonomi antara wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, dimana Kota Batam merupakan daerah yang menjadi pusat kegiatan pertumbuhan ekonomi dengan angka paling tinggi dibanding daerah lainnya. Sehingga aglomerasi menjadi salah satu variabel yang diangkat dalam penelitian ini dalam pengaruhnya terhadap ketimpangan pembangunan. Berdasarkan indentifikasi masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis kondisi ketimpangan yang terjadi diantar kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, serta menganalisis variabel yang menjadi faktor tingginya ketimpangan pembangunan antar kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau.

II. LANDASAN TEORI

Terdapat tiga tujuan penting dalam pembangunan menurut Todaro & Smith (2006) yaitu; 1). Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang dalam kebutuhan pokok, seperti pangan sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan; 2). Meningkatnya standar hidup tidak dilihat hanya dengan meningkatnya pendapatan, namun juga meliputi dengan adanya penambahan ketersedianya lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan perhatian lebih atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang keseluruhannya itu tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan materi saja, melainkan juga mampu menumbuhkan harga diri pada individu dan bangsa yang bersangkutan; 3). Perluasan pilihan ekonomis dan juga social untuk setiap individu maupun bangsa secara menyeluruh, namun dapat dilakukan dengan memberi kebebasan mereka dari belitan sikap menghamba serta perasaan ketergantungan, terhadap orang atau bangsa-bangsa lain, namun juga dari setiap faktor yang berpotensi merendahkan norma kemanusiaan mereka.

Dalam pembangunan ekonomi wilayah, masyarakat harus memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya sosial, sumber daya institusional dan juga sumber daya fisik yang dimiliki agar menciptakan sistem perekonomian yang mandiri (dalam arti berkecukupan serta berkelanjutan) (Adisasmita, 2005).

Ciri dan juga sifat utama dalam pembangunan berorientasi berbasis ekonomi wilayah dengan melakukan penekanan pada kebijakan pembangunan pribumi (*endogenous development policie*) dari memanfaatkan sumber daya manusia lokal, sumber daya institusional lokal serta sumber daya fisik lokal. Hal ini menekankan pada pemberian prakarsa lokal dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kegiatan ekonomi secara lebih luas (Adisasmita, 2005)

Dalam Proses pembangunan ekonomi di suatu daerah, ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan masalah yang sering terjadi. Pada awalnya ketimpangan

terjadi karena adanya perbedaan kekayaan kandungan alam dan kondisi geografis pada setiap wilayah. Akan mengakibatkan adanya perbedaan kemampuan antar wilayah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan, sehingga terbagi menjadi dua jenis kategori yaitu daerah relatif maju (*developed region*) dan daerah relatif terbelakang (*undeveloped region*). Ketimpangan pembangunan akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah (Sjafrizal, 2012).

Dalam teori kausasi kumulatif, Myrdal mengatakan bahwa ekspansi yang terjadi pada suatu daerah mempunyai pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) terhadap tempat lainnya atau tempat disekitarnya. Terjadinya arus perpindahan tenaga kerja (migrasi), perpindahan modal dan juga perdagangan yang merupakan sarana bagi proses kumulatif, mengarah keatas pada daerah yang bernasib baik. Maka ekspansi akan menguntungkan bagi daerah yang memiliki ekspansi yang cepat dan merugikan bagi daerah lain (Adisasmita, 2005).

Menurut Myrdal mengenai dampak balik (*Backwash Effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*Spread Effect*) cenderung mengecil. Secara kumulatif kecenderungan tersebut mengakibatkan semakin buruknya kondisi ketimpangan secara internasional dan regional di antara daerah lainnya yang terbelakang. Myrdal berpendapat jika dilakukan pembangunan ekonomi dalam suatu negara atau daerah, akan muncul dua faktor, yaitu pertama memperburuk kondisi ekonomi bagi daerah miskin yang disebut dengan *backwash effects* dan kedua terjadinya dorong kepada daerah miskin untuk lebih maju disebut dengan *spread effects* atau *trickle down effects*.

Salah satu model yang cukup representatif menurut Sjafrizal (2012) dalam mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah Indeks Williamson yang dikemukakan oleh Williamson (1965). Williamson mengemukakan model V_w (indeks tertimpang terhadap jumlah penduduk) dan V_{uw} (tidak tertimbang) dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita dalam suatu negara pada jangka waktu tertentu. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun menurut Sjafrizal (2012) model ini merupakan model yang cukup representative sebagai tolak ukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah yaitu indeks Williamson yang dikemukakan Williamson (1965).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari regresi dan analisis data mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), investasi, dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan di Kepulauan Riau dalam jangka waktu 2012 sampai dengan 2019. Membahas mengenai hasil dari penentuan yang menunjukkan dalam teknik analisis data panel melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Dalam Uji chow mengetahui

apakah sebaiknya model yang digunakan *Fixed Effect Model* atau *Common Effect Model*. Apabila hasil dari probabilitas *chi-square* kurang dari 20%, maka *Fixed Effect Model* yang terpilih dan sebaliknya.

TABEL 2. HASIL TES REDUNDANT FIXED EFFECT- LIKELIHOOD RATIO

Effects Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-section F	706.100519	(6,39)	0.0000
Cross-section Chi-square	230.158821	6	0.0000

Hasil uji Chow menunjukkan probabilitas Chi-square sebesar $0,000 < \alpha 0,20$ sehingga menyebabkan menolak H_0 dan menerima H_1 . Maka model fixed effect merupakan model yang terbaik untuk digunakan.

TABEL 3. HASIL TES CORRELATED RANDOM EFFECTS-HAUSMAN TEST

Test Summary	Chi-Sq Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	6.195915	3	0.1025

Sumber: Uji Hausman pada Software eviws 10.

Sedangkan Uji Hausman yang dilakukan untuk mengetahui apakah sebaiknya model yang digunakan antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Apabila hasil probabilitas chi-square kurang dari 20%, maka sebaiknya model menggunakan *fixed effect*. Hasil dari uji hausman Probabilitas *Chi-square* sebesar 0.1025, maka H_1 di terima karena $prob < 0,20$. Sehingga dapat diartikan model *fixed effect* lebih baik untuk digunakan dari pada *random effect*.

TABEL 4. ESTIMASI MODEL

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob
C	-0.169547	-1.320758	0.1943
X1?	0.002585	1.446836	0.1559
LN $X_2^{?(-1)}$	-0.000784	-1.476235	0.1479
AGLOMERASI?	1.509152	4.978177	0.0000

Sumber: Fixed Effect Model dalam software Eviews 10, diolah.

Tahap selanjutnya melakukan uji asumsi signifikan yaitu Uji T, Uji F dan Uji R^2 . Menurut hasil Uji F maka diperoleh F-hitung yaitu sebesar 1050.349 serta probabilitas F sebesar 0.0000 dikatakann signifikan jika menggunakan taraf signifikan sebesar 20%. Sehingga hasil ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas yaitu IPM, investasi dan aglomerasi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ketimpangan.

Menurut hasil Uji T yang diperoleh maka menunjukkan variabel IPM memiliki t-statistik sebesar 0.001787 serta probabilitas sebesar 0,1559 dalam taraf signifikansi 20%, maka pada variabel IPM secara mandiri signifikan dan nilai

koefisien regresi sebesar 0,002585 yang menunjukkan IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan ketimpangan. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan variabel investasi memiliki t-statistik sebesar -1.476235 serta probabilitas sebesar 0,1479 dalam taraf signifikansi 20%, maka pada variabel investasi secara individu signifikan dan nilai koefisien regresi sebesar -0,000784 yang menunjukkan investasi berpengaruh secara negatif terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Dan terakhir berdasarkan hasil yang diperoleh maka analisis regresi menunjukkan variabel aglomerasi memiliki t-statistik sebesar 4.978177 serta probabilitas sebesar 0,0000 dengan taraf signifikan sebesar 20%. Maka variabel aglomerasi secara individu signifikan dan nilai dari koefisien regresi 1.509.152 menunjukkan variabel aglomerasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Pada Uji Koefisien determinan (R^2) hasil yang didapat melalui perhitungan menunjukkan nilai R-square = 0.995891 maka diartikan bahwa total ketimpangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 99% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang terdapat diluar variabel yang digunakan.

IV.

TABEL 5. HASIL ANALISIS KABUPATEN/KOTA

FIXED EFFECT (CROSS)

Karimun	-0.004893
Bintan	0.044922
Natuna	0.160332
Lingga	0.018496
Kepulauan Anambas	0.250904
Batam	-0.474640
Tanjung Pinang	0.004879

Sumber: *Fixed Effect Model* Eviews 10, diolah
Langkah selanjutnya analisis ekonomi antara variabel dependen. Menurut hasil koefisien *Fixed Effect* menunjukan bahwa pada masing-masing Kabupaten dan Kota memiliki tingkat yang berbeda. Yang mengartikan bahwa setiap variabel bebas memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap ketimpangan di tiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Ketimpangan paling tinggi ada di Kabupaten Kepulauan Anambas 0.250904, Kabupaten Natuna 0.160332, Kabupaten Bintan 0.044922, Kabupaten Lingga 0.018496, Kota Tanjung Pinang 0.004879, Kabupaten Karimun -0.004893, Kota Batam -0.474640.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai koefisien sebesar 0.0025 menunjukkan IPM memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan di Kepulauan Riau. Ketika terjadinya peningkatan IPM sebesar 1% akan

menyebabkan peningkatan sebesar 0.0025 persen pada ketimpangan. Indek pembangunan manusia sebagai tolak ukur pencapaian pembangunan dalam sisi sosioekonomi suatu wilayah, dimana indeks pembangunan diukur melalui pendidikan, kesehatan serta pendapatan riil. Ketika pendidikan yang didapat semakin tinggi maka kemampuan yang dimiliki juga semakin meningkat sehingga output yang dihasilkan juga meningkat dan akhirnya pembangunan suatu wilayah meningkat dikarenakan kualitas dari sumber daya yang dimiliki berkualitas. Sehingga dalam pembangunan manusia diperlukan secara merata kesemua wilayah. Kondisi pembangunan manusia yang belum merata disetiap daerah di Kepulauan Riau menyebabkan ketimpangan sehingga perlunya perhatian lebih terhadap daerah-daerah yang masih terbelakang.

Nilai koefisien investasi sebesar -0,000784 menunjukkan hubungan negatif pada ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kepulauan Riau. Hal ini berarti ketika terjadinya peningkatan investasi sebesar 1% akan menyebabkan penurunan sebesar 0,000784 persen pada ketimpangan wilayah di Kepulauan Riau. Hasil dari regresi tersebut sejalan dengan atau sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menduga adanya hubungan negatif dan signifikan diantara investasi dan ketimpangan antar wilayah. Artinya ketika investasi meningkat maka ketimpangan pembangunan antar wilayah berkurang, hal ini terjadi ketika banyaknya investasi pada suatu wilayah maka akan meningkatkan output yang dihasilkan sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut dan mengurangi ketimpangan yang terjadi. Menurut teori Myrdal yang mengatakan bahwa dengan adanya perpindahan modal serta motif laba yang cenderung akan meningkatkan ketimpangan antar wilayah namun hal ini tidak terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Dikarenakan dampak sebar (*Spread Effect*) yang cenderung lebih besar dibanding dampak balik (*Backwash Effect*). Sehingga investasi yang terjadi memberi penyebaran dari pusat investasi ke daerah-daerah lainnya sehingga akan berdampak terhadap pengurangan ketimpangan.

Hasil pada probabilitas aglomerasi yang sebesar 0.0000 lebih besar dari alpha 20%. Pada kenaikan 1 persen Aglomerasi akan meningkatkan ketimpangan wilayah sebesar 1.509152 persen. Hubungan positif terjadi di antara aglomerasi dan ketimpangan dikarenakan terpusatnya kegiatan produksi yang terjadi cukup tinggi hanya berada di beberapa wilayah sehingga akan mendorong pertumbuhan daerah lebih cepat. Sedangkan bagi daerah lainnya yang memiliki konsentrasi produksi yang lebih rendah akan mendorong pengangguran serta pendapatan masyarakat setempat yang juga rendah dan pembangunan daerah yang juga melambat. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi terjadi ketika berbagai produsen atau pelaku usaha memilih lokasi yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan produksi secara jangka panjang sehingga akan memperoleh keuntungan bagi masyarakat yang apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha disekitar lokasi tersebut. Dan ketika keuntungan Aglomerasi (*Large Scale*

Economic, Localization Economies dan Urbanization Economies) yang dapat dihasilkan oleh sebuah pusat pertumbuhan yang besar maka pusat pertumbuhan tersebut akan berkembang dengan pesat namun sebaliknya pusat tersebut akan sulit bila keuntungan aglomerasi yang dimiliki tidak berkerja dan tidak ada sama sekali. Sehingga akan mengakibatkan ketimpangan antar daerah.

V. KESIMPULAN

Bahwa IPM, investasi dan aglomerasi memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap ketimpangan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, dan secara parsial IPM dan Aglomerasi memiliki pengaruh positif dan signifikan sedangkan Investasi memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2012 sampai 2019. Dan pada masing masing Kabupaten dan Kota memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap variabel bebas didalam ketimpangan antar wilayah.

VI. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adisasmita, R. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah* (Pertama). Graha Ilmu .
- [2] BPS. (2019a). *Indeks Pembangunan Manusia 2019*. Badan Pusat Statistik.
- [3] BPS. (2019b). Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2019. *Wikipedia*, VIII(02), 1. https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
- [4] Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional (Teori dan Aplikasi)*. Praninta Offset.
- [5] Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (pertama). PT. Rajagrafindo Persada.
- [6] Tribunnews.com, & Pamungkas, P. (2020, January). Kepulauan Riau, Provinsi di Indonesia dengan Luas Daerah yang 96% Merupakan Lautan dan 4% Daratan. <https://Video.Tribunnews.Com/View/114925/Kepulauan-Riau-Provinsi-Di-Indonesia-Dengan-Luas-Daerah-Yang-96-Merupakan-Lautan-Dan-4-Daratan>.
- [7] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (Kesebelas). Erlangga.
- [8] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Pearson Education Limited.
- [9] Kompasiana. (2012, July). Perkembangan Kawasan Industri Batam, Bintan dan Karimun. <https://www.kompasiana.com/Arifhakim/55129471a33311c75cba7d9b/Perkembangan-Kawasan-Industri-Batam-Bintan-Dan-Karimun>.
- [10] Harefa, M. (2013). pemekaran wilayah batam dan bintan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4 No. 2.